

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2006), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Mahsun, Mohhammad (2013), *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tahun 2008 *perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 *tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 *tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 *tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*.
- Surat Ketetapan Gubernur DIY Nomor 95/KEP/2015 *tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *tentang Cukai*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Fibriani, Dita (2013), “Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Murti, Ika Ayu (2011), “Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Surakarta”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nugroho, Bayu (2014), “Analisis Dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010-2012”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rolisa, Cahya., dkk. (2014), “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Di Kabupaten Jember”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jawa Timur.

N. Masdjojo, Gregorius dan Sukartono (2009), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta analisis Flypaper Effect kabupaten/kota di Jawa Tengah ”, Jurnal: Tema, Volume 6 Edisi 1, Maret 2009 hlm. 32-50.

<http://korankabar.com/realisasi-dbhcht-rawan-penyimpangan> diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 13:36 WIB.

<http://mandalikanews.com/Indeks.php/2015/12/30/kasus-dbhcht-terganjal-di-bpkp> diakses pada tanggal 21 April 2016 pukul 13.25 WIB.

<http://m.okezone.com/read/2015/10/15/337/tembakau-dinilai-berkontribusi-besar-kepada-negara> diakses pada tanggal 29 Februari 2014 pukul 14:04 WIB.

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=34> diakses pada tanggal 09 April 2016 pukul 12.57 WIB.

<http://suarantb.co.id/2016/01/28/bpkp-kantongi-kesimpulan-audit-dbhcht.html> diakses pada tanggal 09 April 2016 pukul 16:21 WIB.

<http://www.jogjaprovo.go.id/profil> diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 17.22 WIB.